



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DERI DARIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **426432**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.145.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 6039 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 222.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G, AT (TGN40R-GKPKD) SILVER METALIK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 72.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 868.983.300

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.307.983.300



III. HUTANG

Rp. 159.670.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.148.313.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.